

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S.M., 1957, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, JB. Wolter – Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- Arief, Basrief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Campbel, Henry, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publishing, St Paul.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. , 2015, *The Legal System : A Social Science Perspective (New York : Russel Sage Foundation, 1975)* diterjemahkan oleh M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black 's Law Dictionary, (Editor in Chief), St. Paul : West Group, Eight Edition*
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative of Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Delik – delik tersebar di luar KUHP*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hieraj, Eddy O.S 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kristian, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nusa Aulia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, PT. Media Pustaka Phoenix Cetakan kelima, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

- Lopa, Baharudin, 1986, *Korupsi Sebab-sebabnya dan Penanggulangannya*, Prisma 3, Jakarta.
- Manan Abdul, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Manthovani, Reda, 2013, *Penyadapan VS Privasi Tinjauan Yuridis, Kasus Dan Komparatif*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- , 2017, *Kumpulan Catatan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Abdul Karim, 1972, *Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- S Podgor, Ellen, 1993, *White Collar Crime*, St Paul Minn : West Publishing Co.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung.

Triatmodjo, Marsudi, 2016, *Bahan Kuliah Teori Hukum Sesi I*, Jakarta: Magister Ilmu Hukum Jakarta.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (selanjutnya disebut KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3874.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

C. Artikel Jurnal

Yuvens, Damian Agata, *et al*, “Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No.3, 7 Juni 2017

D. Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Bermawi, Wirdaswan, 2015, “Peranan Penyadapan (Intersepsi) Dalam menanggulangi Tindak Pidana Tertentu”, *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewita, Misra, 2011, “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Fikriyah, Amalina, 2017, “Implikasi Asas *Rights of Privacy* dan *Safeguards Against Illegitimate Access*”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Artikel

Adhyaksa Indonesia, Edisi Khusus Tahun I Juli 2014, *Riwayat Kejaksaan Nusantara*, PT Haidar Indo Telenet, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. , 1997, *Wewenang*, Jurnal Yuridika, Fak. Hukum Universitas Airlangga N0. 5 & 6 Th XII, Surabaya.

Huntington, Samuel, “*Modern dan Korupsi*”, disadur dari Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1977, *Bunga Rampai Karangan-Karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*, Bhratara karya Aksara, Jakarta.

Makarim, Edmon, “Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)”, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/218/153>, sebagaimana disadur dari Edmon Makarim, Edisi April – Juni 2010, *Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No.2, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

Warta Pengawasan, *Berkoordinasi Terapkan Strategi Berantas Korupsi*, Vol.XXII/Nomor 4/Tahun 2015.ISSN:0854-0519, BPKP, Jakarta.

F. Internet

Arti Ekawati, “Ahmad Fathanah Divonis 14 Tahun Penjara”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131104_vonis_faathanah, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Bay Ismoyo, “Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia disebut membaik tapi lamban”, www.bbc.com/indonesia-38734494, diakses pada tanggal 26 Januari 2017.

Dimas Jarot Bayu, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh Peringkat”, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2019/01/29/indek-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-tujuh-peringkat>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Harnelis Fitriyani, “Kasus Korupsi Artalita Suryani”, <http://harnelis-fitriyani.blogspot.co.id/2012/03/kasus-korupsi-artalitasuryani.html>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Icha Rastika, “Pakai “Apel malang” dan “Apel Washington: supaya tidak vulgar””, <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/16/13045852/Pakai.Apel.Malang.dan.Apel.Washington.supaya.Tidak.Vulgar>, diakses tanggal 22 Juli 2018

Indah Mutiara Kami, “Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia peringkat Ke-96”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

Ind/P-5, “Kewenangan Penyadapan untuk Kejaksaan Akan Dibedakan <http://mediaindonesia.com/read/detail/2800-kewenangan-penyadapan-untuk-kejaksaan-akan-dibedakan>”, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

Kejaksaan Agung, “Pengertian Kejaksaan”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses tanggal 20 Maret 2020.

Malvyandie Haryadi (editor), “ICW : Kejaksaan Terbanyak Berantas Koruptor Sepanjang 2016”, <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/05/31/icw-kejaksaan-terbanyak-berantas-koruptor-sepanjang-2016>, diakses 10 Januari 2017.

Purwanto, “KPK:87 OTT Selama Empat Tahun Terakhir”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1284671/kpk-87-ott-selama-empat-tahun-terakhir>, diakses tanggal 15 April 2020.

Ridwan Saripi, Mohammad, “Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi” (Vol.22/ No.7/ Agustus/ 2016 Jurnal Hukum Unsrat),

<https://media.neliti.com/media/publications/81164-ID-jaksaselaku-penyidiktindak-pidana-koru.pdf>, diakses tanggal 20 April 2018.

Rina Atriana, “Ketika PNS Pengadilan Pemilik 19 Mobil Bikin Jaksa KPK Geleng-geleng Kepala”, <http://news.detik.com/berita/3320160/ketika-pns-pengadilan-pemilik-19-mobil-bikin-jaksa-kpk-geleng-geleng-kepala>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

wikipedia, “Sejarah”, https://wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Supriyadi Widodo Eddyono, “Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia”, <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.